

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A.Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan Liberal-kapitalis mempunyai pengaruh yang luas, begitu pula pada saat era Perang Dingin yang tejadipasca berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan Uni Soviet dengan ideologi komunis saling memperebutkan dominasi dalam dunia internasional, hingga Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur berakhir pada tahun 1990 dengan kemenangan Blok Barat setelah usainya Perang Dingin dimulailah babak baru bagi Amerika Serikat dalam memperluas pengaruh dan kepentingannya. Bagaimana yang dimengerti secara umum, istilah “kepentingan nasional” memiliki arti lain yaitu egois dan tidak berprinsip, istilah tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa keuntungan geopolitik dan ekonomi sebuah Negara tanpa menghiraukan tentang moralitas, hukum, atau kesejahteraan yang lain, kecuali hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan sebuah Negara.<sup>1</sup>

Pada era Presiden Obama Amerika Serikat memiliki pengaruh signifikan dalam konstelasi politik dunia termasuk Timur Tengah, dengan status tersebut Amerika memiliki banyak kepentingan yang harus dipenuhi seperti kepentingan ekonomi, militer, dan penyebaran ideologi demokrasi melalui kebijakan luar negerinya, kebijakan luar negeri A.S dibuat

---

<sup>1</sup>Seth P. Tillman, *The United States In The Middle East: Interests and Obstacles*. Bloomington: Indiana University Press, 1982. (hlm.43)

untuk menjaga eksistensinya di suatu wilayah, baik itu kepentingannya sendiri, kepentingan sekutunya dan para penguasa sekutu A.S di Timur Tengah serta untuk menjamin kemudahan eksplorasi dan transportasi minyak ke seluruh penjuru dunia.<sup>2</sup>

Dalam kebijakan luar negeri nya Presiden Obama memiliki pendekatan yang sama dengan Era Presiden Nixon dalam mengambil kebijakan luar negeri terutama dikawasan Timur Tengah yang dimana kedua Presiden menggunakan kebijakan *Detente*, kebijakan ini digunakan untuk mengurangi eskalasi adventurisme pasukan Amerika di Timur Tengah., Amerika hadir di Timur Tengah dengan motivasi untuk menyebarkan ideologi nya yaitu demokrasi, Amerika menganggap diri nya sebagai “*the champion of democracy*” dan “*the guardian of democracy*” hal inilah kemudian yang menjadi motivasi A.S untuk melakukan intervensi di dalam berbagai konflik di Timur Tengah

Amerika menginginkan agar posisinya menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi di wilayah Timur Tengah, hal tersebut didasarkan oleh fakta bahwa kawasan Timur Tengah memiliki nilai strategis dalam politik dunia, nilai-nilai strategis tersebut membuat kawasan Timur Tengah menjadi tempat perebutan pengaruh dan kepentingan bagi negara-negara besar.

Motivasi yang kuat lainnya datang pasca Peristiwa 9/11 di era presiden Bush pada tahun 2001 yang menasar WTC. A.S berusaha untuk mencegah munculnya kekuatan politik berhaluan Islam dan berusaha menjatuhkan pemimpin negara Islam yang masih menganut sistem tradisional yang mengikat, seperti pemerintahan Monarkhi Absolute, contohnya yaitu gelombang Arab Spring yang melanda negara-negara di Timur Tengah pada tahun 2011.

---

<sup>2</sup>Sidik Jatmika, *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa Publishing House, 2014. (hlm.136-137)

Salah satu negara yang terpengaruh gelombang Arab Spring yaitu Suriah, rakyat menuntut Bashar al-Assad turun dari kursi kepemimpinan karena dianggap tidak demokratis dan adil terhadap rakyatnya sehingga rakyat Suriah menuntut pengembalian hak-hak sipil. Rezim Bashar al-Assad mengklaim dirinya sebagai pemimpin sah yang dimana ia mendapatkan legitimasi secara penuh dari rakyatnya sehingga segala macam usaha untuk meng-kudeta rezimnya dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Meskipun dengan kebijakan *Detente*, Presiden Obama dalam Krisis Suriah mempunyai strategi yang lain karena dalam Krisis Suriah diawali dengan peristiwa Arab Spring yang mengejutkan tidak hanya Amerika tetapi seluruh Dunia yang dimana negara-negara Arab dengan sistem Monarki Absolute di jatuhkan oleh rakyatnya yang mendukung pemerintahan yang lebih demokratis, tentu kejadian ini tidak disia-siakan oleh Amerika dengan mengirim pasukannya ke negara-negara Arab yang berkecamuk salah satunya Suriah.

Negara-negara lain mulai menunjukkan keinginannya untuk melibatkan dirinya ke dalam konflik di Suriah ini, yang dimana dua negara besar terlibat di dalamnya yaitu; Russia melalui menteri luar negerinya Sergej Lavrov, mendukung rezim yang saat ini masih di pegang oleh Bashar al-Assad dan Amerika Serikat bersama Saudi yang menentang otoritas Bashar al-Assad saat ini.

Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisibersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika akan mengirimkan bantuan senjata kepada kelompok pemberontak/oposisi setelah Amerika Serikat meyakini dan memiliki bukti bahwa Presiden Assad menggunakan senjata kimia untuk melawan kelompok

oposisi<sup>3</sup>. Selain mempersenjatai kelompok oposisi, Presiden Obama juga merencanakan *limited military strike* terhadap Suriah sebagai bentuk hukuman atas penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya yang mengakibatkan rakyat Suriah itu sendiri yang menjadi korban.

Amerika serta negara-negara sekutu seperti Inggris, Perancis, Arab Saudi dan Turki mendukung agar pihak Oposisi dari Rezim Assad seperti FSA (Free Syrian Army) dan NFC serta bantuan dana sebesar \$60 juta pada tahun 2013 untuk terus melakukan perlawanan agar terwujudnya pemerintahan yang demokratis, sedangkan di sisi lain Russia dan Iran mendukung Rezim Bashar al-Assad untuk terus mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Suriah, Russia memiliki markas militer di wilayah Suriah tepatnya di Tartus sehingga dengan mudah memobilisasi militernya jika Amerika dan sekutu melancarkan serangan terhadap Suriah.

Amerika mengumumkan bahwa Amerika memberikan tambahan bantuan humaniter kepada Syria sebesar USD 364 Juta, jika ditotal sejak tahun 2011 hingga september 2016 maka bantuan dana sebesar \$6 miliar telah dikucurkan untuk penanganan darurat di Suriah termasuk untuk menyediakan cadangan makanan, obat-obatan, air minum bersih dan suplai lainnya untuk membantu masyarakat Suriah yang terdampak oleh perang. Amerika juga menerima pengungsi Suriah sebanyak 10.000 orang per tahunnya tetapi jumlah tersebut

---

<sup>3</sup>Associated Press, 'UN chief opposes US arms to Syria rebels, says on site probe must confirm chemical weapon use' <http://www.foxnews.com/world/2013/06/14/un-chief-opposes-us-arms-to-syria-rebels-says-on-site-probe-must-confirm/>, diakses pada 6 Desember 2017

terus meingkat dari 2011 hingga 2016 sebanyak 12.500 pengungsi.<sup>4</sup>

Upaya lain yang dilakukan Amerika adalah dengan mengadakan Konferensi Jenewa II pada 30 Juni 2012 atas prakarsa Amerika dan Rusia yang dimediasi oleh PBB, dimana dalam pertemuan tersebut kedua pihak yang bersengketa diharapkan dapat duduk bersama membentuk sebuah pemerintah transisi dengan wewenang eksekutif penuh, namun nampak nya Konferensi Jenewa ini belum dapat memberikan dampak yang berarti akibat adanya perbedaan kepentingan-kepentingan pihak terkait dalam konflik ini.<sup>5</sup> Langkah Amerika melalui jalur diplomatis berupa pengajuan Resolusi DK PBB terkait penggunaan senjata kimia yang menurut OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon) bahwa penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh militer Suriah dikategorikan sebagai temuan yang dapat dibuktikan dan telah melanggar Resolusi PBB 2118 tahun 2013.

Usaha Amerika tidak mudah dikarenakan kurangnya dukungan oleh sekutu-sekutu yang tidak seperti dulu dimana mereka mendukung agresi militer Amerika Serikat di Afghanistan, adanya kehadiran Rusia yang kuat berada dibalik rezim Bashar al-Assad sehingga konflik Suriah menjadi konflik yang berkepanjangan tanpa adanya titik terang resolusi damai, pada Oktober 2011 dan Juli 2012 Amerika yang mendukung draf resolusi yang berisi kecaman terhadap Rezim Assad mengalami kegagalan dikarenakan

---

<sup>4</sup>USAID: Crisis in Syria, <https://www.usaid.gov/syria>, diakses pada 19 Februari 2018

<sup>5</sup>Adirini Pujayanti, *Internasionalisasi Konflik Suriah dan Peran Indonesia*, artikel, [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-V-11-I-P3DI-Juni-2013-16.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-V-11-I-P3DI-Juni-2013-16.pdf), diakses pada 19 Februari 2018.

Russia dan China mem-veto resolusi tersebut, hal ini tentu menghancurkan harapan akan meredanya konflik di Suriah.

Beragam pendapat yang dikemukakan terkait masalah yang menjadi sumber konflik di Suriah. *Pertama*, masalah sosial, ekonomi dan politik dalam negeri yang dialami oleh Suriah seperti tingginya jumlah pengangguran, tingginya inflasi, terbatasnya kesempatan mobilitas sosial, pembatasan hak politik serta aparat keamanan yang represif. *Kedua*, tuntutan penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim keluarga Assad yang berkuasa sejak tahun 1970 sampai saat ini.

Merupakan hal yang wajar jika terjadi demo yang menuntut pergantian rezim yang telah berkuasa selama 46 tahun di Suriah, terutama jika ditinjau dari segi kinerja yang tidak memuaskan bagi rakyat yang seharusnya pemerintah bekerja untuk memajukan kehidupan masyarakat, jika saja kinerja pemerintahan tersebut sesuai dengan harapan rakyat maka tidak akan ada protes yang berujung kepada munculnya perang sipil antara pemerintah dan oposisinya yang kemudian disusupi oleh jihadis seperti Al-Qaida sehingga eskalasi peperangan pun semakin besar dan berkepanjangan.

Sikap Suriah yang selalu melakukan perlawanan terhadap negara-negara Arab dan sekutunya membuat Amerika, Saudi, Qatar dan Turki memberikan dukungannya kepada pihak oposisi yang sedang berusaha menumbangkan rezim Assad walaupun dukungan tersebut diberikan karena terdapat kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah.

PBB dalam hal ini menjadi wadah negara-negara pemegang hak veto yang mana negara-negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan, Amerika Serikat menjadikan PBB sebagai tempatnya untuk menyalurkan kepentingan dan mencari dukungan negara-negara lain yang berguna dalam menjalankan strategi untuk mengintervensi

koflik di Suriah dengan berlandaskan Krisis Kemanusiaan untuk memenuhi kepentingannya dan sekutunya.

Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dipandang sebagai negara dengan kekuatan utama ketika PBB didirikan dan diberikan hak veto berdasarkan pandangan jika negara dengan kekuatan besar tidak diberikan tempat istimewa PBB tidak akan bekerja dalam krisis yang berlangsung di Suriah yang merupakan efek beruntun dari peristiwa Arab Spring yang bermula pada akhir tahun 2010.

Banyaknya korban jiwa dalam krisis ini membuat Amerika berusaha untuk menyelesaikannya dengan bantuan PBB, hal ini dikarenakan peristiwa ini sudah memasuki ranah Krisis Kemanusiaan yang dimana rezim Bashar al-Assad menyerang rakyatnya sendirimenggunakan senjata kimia sehingga korban jiwa berjatuhan dari kalangan sipil, ratusan ribu warga Suriah mengungsi untuk bertahan hidup dari serangan pemimpinya.

Sejak meletusnya konflik di Suriah pada bulan Maret 2011 sampai dengan Agustus 2016 jumlah korban meninggal sebanyak 301.781 jiwa, korban dari warga sipil terdiri dari 15.099 anak-anak dan 10.018 wanita<sup>6</sup>, sementara yang mengungsi sebanyak 2,4 juta jiwa dan 1\4 diantara pengungsi tersebut adalah anak-anak dan perempuan, sekitar 4 juta warga

Suriah kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Syrian Observatory for Human Rights

<sup>7</sup>A. Muchaddam Fahham dan A.M. Kartaatmaja. *Politica vol 5: Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*, 1 Juni 2014,

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam Konflik Suriah pada pada era Obama tahun 2011-2016?

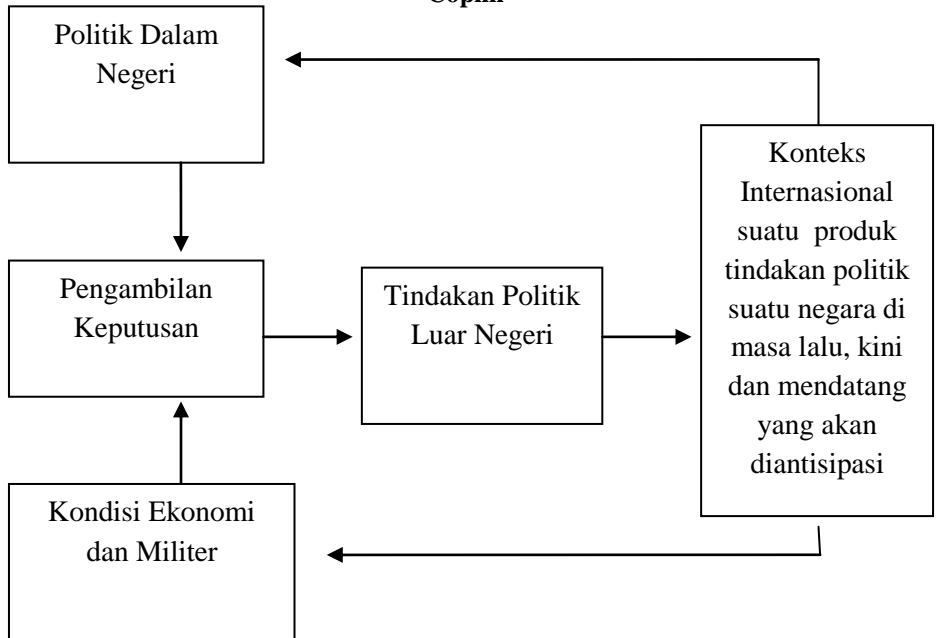
## **C. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri (William D.Coplin).**

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkain keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Amerika, penulis akan menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politic*". Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkain proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



**Gambar 1.1. Alur Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri Coplin**



Sumber: William D. Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. 2003. (hlm. 30)

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pembuat kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk

mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “*policy influencer*”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan. Kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain<sup>8</sup>.

#### **a. Kondisi Politik Dalam Negeri**

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “*policy influencer*”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan.

Lebih jauh Coplin menambahkan, dalam sistem pengaruh kebijakan terjadi hubungan timbal-balik antara pengambil keputusan dengan *policy influencer*. *Policy influencer* merupakan sumber dukungan bagi penguatan rezim tertentu dalam suatu negara. Hal tersebut berlaku bagi semua sistem pemerintahan, baik yang demokratis maupun yang autokrasi. Para pemimpin negara sangat bergantung pada kemauan rakyatnya untuk memberi dukungan. Dukungan dapat berupa kesetiaan angkatan bersenjata, keuangan dari para pengusaha, dukungan rakyat dalam pemilihan umum dll. Rezim yang memerintah sangat membutuhkan dukungan tersebut untuk membuat kedudukannya lebih pasti dan kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran sehingga menguatkan legitimasinya.

---

<sup>8</sup>William D. Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo edisi ke-2. 2003. (hlm. 30)

Dalam kasus ini adanya interaksi antara Kongres (pengambil kebijakan luar maupun dalam negeri) dan Presiden Obama dimana Suriah menjadi salah satu negara yang sedang dilanda krisis sejak 2011 dan Presiden Obama sebagai *Policy Influencer* berupaya meyakinkan Kongres untuk membantu rakyat Suriah dan oposisi Rezim Assad untuk menyelesaikan krisis tersebut karena salah satu kepentingan utama Amerika sejak 1973 yaitu untuk menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah serta adanya keterlibatan Russia yang memiliki markas angkatan laut di Tartus membuat Presiden Obama berusaha agar Kongres segera menyetujui usulan Obama untuk terlibat dalam Krisis Suriah.

### **b. Kemampuan Ekonomi dan Militer**

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi para raja. Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa.

Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat. Dalam era industri modern, jika ekonomi mampu memproduksi barang secara massal maka ia juga mempunyai kemampuan untuk menghancurkan masal melalui industri senjata yang semakin destruktif. Jika tanah dan emas menjadi tolak ukur di abad feodal, maka kemajuan industri menduduki posisi penting dalam era modern ini.

Coplin mencotohkan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang keduanya pada saat itu terlibat perlombaan senjata dalam Perang Dingin. Kedua negara merupakan negara yang telah makmur secara ekonomi. Ekonomi negara didukung oleh sektor industri modern, sehingga mampu untuk memproduksi peralatan militer yang lebih canggih dibanding dengan negara-negara yang masih mengandalkan sektor pertanian dalam negeri untuk menopang perekonomian nasionalnya. Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu lebih aktif dalam “panggung” politik internasional.

Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan 3 kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana akan efektif. Misalnya Amerika Serikat, pasca Perang Dingin negara ini semakin agresif menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah sistem politik internasional.

Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (*bargaining position*) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional. Singkatnya, semakin baik perekonomian dan militer suatu negara, maka akan semakin mampu menyeimbangkan antar kepentingan nasional dengan kapabilitasnya.

Kebijakan politik Amerika Serikat terhadap Suriah didukung oleh kekuatan Ekonomi dan Militer nasional. Dengan fakta bahwa Amerika Serikat merupakan Negara Terkaya di dunia yang mana secara otomatis anggaran untuk pendanaan sektor pengembangan angkatan bersenjata semakin banyak, membuat angkatan bersenjata Amerika menjadi Angkatan bersenjata yang sangat disegani dikarenakan telah majunya teknologi persenjataan dan alat tempurnya, hal ini didukung pula oleh industri persenjataan yang sangat populer di Amerika itu sendiri, dimana hampir setiap orang diberikan keleluasaan dalam memiliki senjata secara individual sehingga perkembangan teknologi persenjataan merupakan hal yang secara alamiah terjadi di dalam negeri, sehingga teknologi alutsista Amerika menjadi semakin maju dan disegani oleh Negara-negara lainnya, hal ini dapat mendukung dan memudahkan Amerika untuk tampil dalam panggung politik internasional karena posisi tawar "*bargaining position*" nya yang tinggi.

Hubungan diplomaticnya dengan Negara-negara di Timur Tengah membuat Amerika Serikat dengan mudah mendapatkan akses ke sumber minyak, hal ini bisa dilihat dari banyaknya perusahaan tambang minyak A.S yang beroperasi di Timur Tengah dan di wilayah lainnya di seluruh dunia, yang mana minyak sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan energi yang menjadi penggerak perekonomian Amerika Serikat, sehingga ekonominya dapat tumbuh dan berjalan dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan yang menjadi pemasukan Negara untuk digunakan sebagai sarana pengembangan militer yang dinilai penting dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan Negeranya sendiri maupun perdamaian dunia.

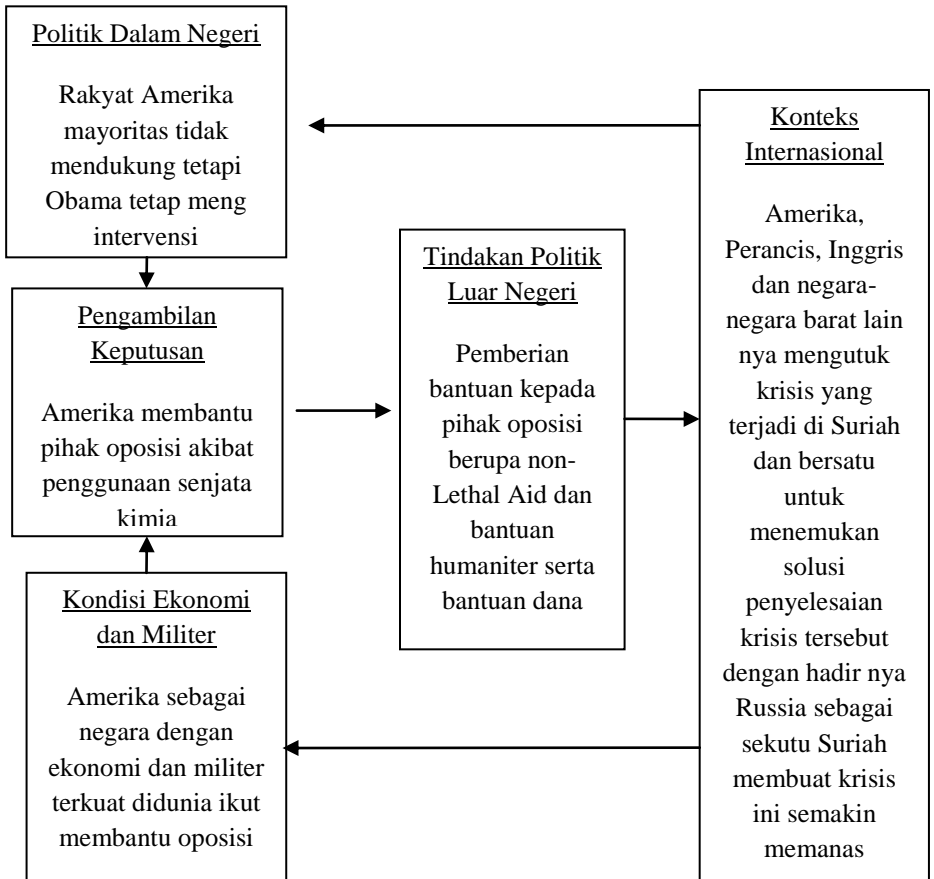
### **c. Konteks Internasional**

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya. Hans J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif.

Keuntungan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara manayang kawan dan yang lawan. Menurut Coplin ada 3 elemen dasar dalam menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis.

Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, walaupun tidak yang terpenting. Faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota.

**Gambar 1.2. Diagram Aplikasi Teori William D.Coplin**



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

## **D. Hipotesa**

Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam Konflik Suriah berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi dalam negeri Amerika Serikat, *Policy Influencer* dimana Presiden Obama berusaha meyakinkan Kongres untuk melancarkan kepentingan Amerika di Timur Tengah dengan membantu Suriah.
2. Ekonomi dan Militer yang dimana Amerika menjadi negara dengan kekuatan Ekonomi dan Militer terbesar di Dunia.
3. Konteks Internasional, Amerika Serikat merupakan Negara yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkup internasional baik dalam hal politik, ekonomi maupun militer.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif, lalu teknik pengumpulan data yang digunakan disini yaitu dengan *caralibrary research* yang diperoleh dari data sekunder seperti buku, dokumen, diktat, makalah dan observasi melalui internet yang penulis gunakan sebagai sumber dan pedoman teori untuk mengkaji masalah yang sedang diteliti.

### **2. Tempat dan Waktu Penelitian**



Penelitian ini akan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Repository Jurnal dan Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Laboratorium Studi Hubungan Internasional.

### **3. Teknik Analisa Data**

Untuk menganalisa data, penulis akan menerapkan metode analisa penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah metode dengan menggambarkan hal-hal yang menjadi objek penelitian, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan yang diteliti

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Amerika Serikat meningkatkan keterlibatannya dalam konflik di Suriah dalam rangka mengaktualisasikan kepentingannya di Suriah khususnya dan Timur Tengah pada umumnya.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian diterapkan agar penelitian yang penulis lakukan menjadi lebih jelas, spesifik dan agar masalah yang dikaji tidak melenceng dari wacana yang dibahas, dengan ditetapkannya jangkauan penelitian, akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya ketidakcocokan antara data-data yang diperoleh oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi maupun para pembaca dalam membaca skripsi ini. Sesuai dengan tema maka jangkauan penelitian akan difokuskan pada periode 2011-2016. 2011. Tahun dimana dimulainya Konflik di Suriah sampai pada tahun 2016 yang dimana berakhirnya era kepemimpinan Presiden Barack Obama.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan, maka tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang berisikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa,

metode penelitian, tujuan penelitian. jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang dinamika kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada saat Perang Dingin, pasca Perang Dingin dan dibandingkan dengan era presiden Barack Obama yang dimana Amerika menjadi salah satu pihak yang mendukung upaya demokratisasi di Suriah dengan mendukung pihak oposisi bersama Arab Saudi, hal ini dibuktikan dengan pengumuman bahwa Amerika mengirimkan bantuan berupa *Non-Lethal Aid* kepada pihak oposisi.

Bab III berisi tentang Konflik Suriah Pasca terjadinya peristiwa Arab Spring yang dimana akan dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu; menceritakan sejarah awal mula Konflik Suriah dan dilanjutkan dengan penjabaran mengenai penyebab terjadinya konflik di Suriah.

Bab IV berisi tentang faktor yang mempengaruhi / penyebab Amerika Serikat ikut terlibat dalam konflik di Suriah ini dan dijabarkan melalui sub bab, yaitu; faktor keterlibatan Russia yang mendukung otoritas Suriah untuk mempertahankan kekuasaannya dan yang kedua adanya kelompok gerakan islam yang dianggap ekstrim.

Bab V berisi Kesimpulan, ringkasan singkat tentang penelitian yang disusun oleh penulis dari seluruh hal-hal yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.